



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2026
#GROWSTRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Laporan Kinerja

TRIWULAN I 2026



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

Jalan Penjajap Timur, Kec. Pemangkat
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
(0562) 242066 | ppn.pemangkat@kkp.go.id



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I 2026 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Triwulan I 2026 ini sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja dan program yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pedoman pelaksanaan capaian kinerja pada tahun berikutnya. Kami menyadari dalam penyusunan Laporan ini masih terdapat beberapa kekurangan termasuk target kinerja yang belum tercapai, sehingga saran dan masukan serta dukungan dari seluruh pegawai PPN Pemangkat maupun kerjasama dari *stakeholder* dapat melengkapi dan menyempurnakan laporan kinerja dimaksud.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi institusi PPN Pemangkat pada khususnya, dan masyarakat nelayan pada umumnya

Sambas, April 2026

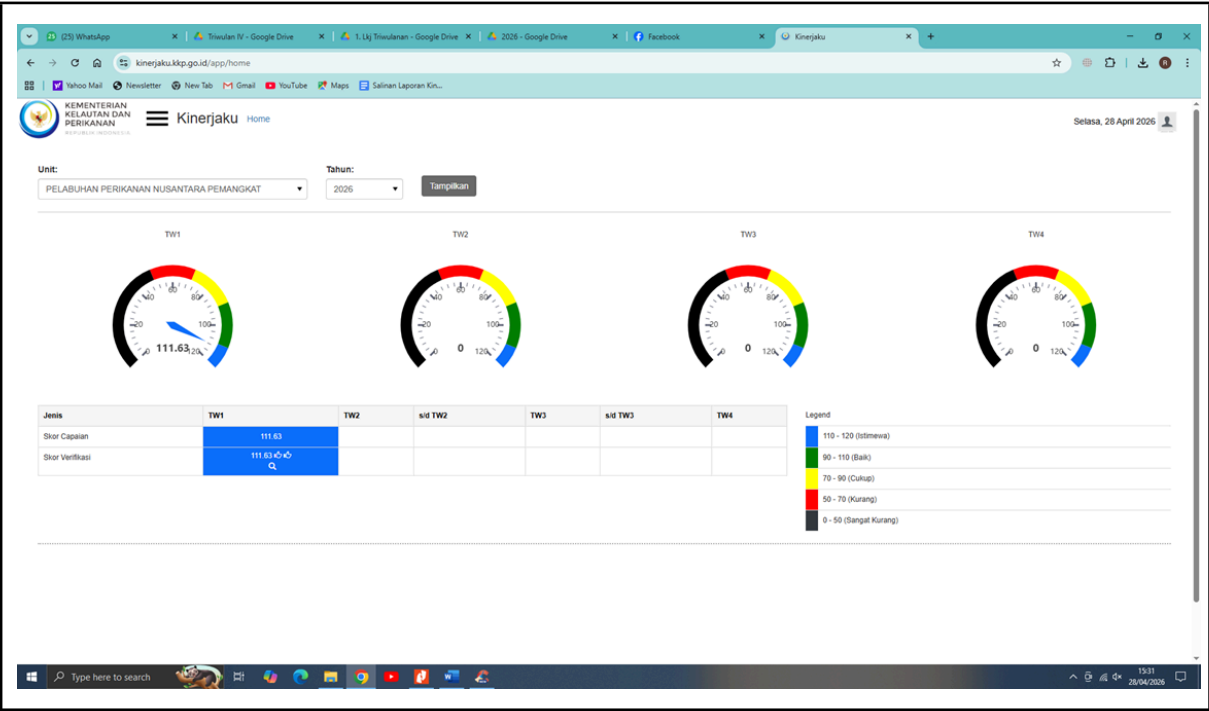
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pemangkat,



Anam Tofani, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I 2026 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh selama Triwulan I. Laporan ini menggambarkan target dan capaian kinerja serta penyajian hasil pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 8 indikator kinerja yang ditargetkan pelaksanaannya pada triwulan I, adapun hasilnya berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Nomor B.1646/DJPT.1/RC.610/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Laporan Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, capaian kinerja PPN Pemangkat pada triwulan I telah melampaui target yang ditentukan dengan Nilai Kinerja Organisasi 111,63 (Kategori Istimewa).



Gambar 1. Capaian Kinerja Triwulan I

Kedelapan IKU tersebut adalah Penerimaan PNBP Non SDA dengan persentase capaian 112%, Produktivitas perikanan tangkap dengan persentase capaian sebesar 162%, Tingkat Kinerja Pelabuhan dengan persentase capaian sebesar 103%, Nilai Pengendalian Lingkungan dengan persentase capaian sebesar 289%, Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan dengan persentase capaian sebesar 100,7%, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan persentase

capaian sebesar 116%, Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan dengan persentase capaian sebesar 120% dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan persentase capaian sebesar 107,35%.

Mekanisme laporan kinerja triwulan I 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada laporan ini tersaji analisis capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, dibandingkan dengan capaian pada IKU yang sama pada triwulan I tahun 2020 s.d. 2025, dibandingkan capaian kerja dengan standar nasional; dalam hal ini dibandingkan dengan PPN Sungailiat dengan rasionalisasi masih dalam satu WPP yang sama yakni WPP 711 (Zona I); selain itu juga disajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dan kegiatan penunjang yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan manusia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja masa yang akan datang. Kami berharap kinerja yang telah dicapai pada triwulan I dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Gambaran Umum	8
1.2. Kedudukan	9
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	10
1.4. Visi, Misi dan Tujuan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Kinerja	14
2.2. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Sasaran Strategis Perikanan Tangkap	18
3.2. Sasaran Strategis PPN Pemangkat	18
3.3. Capaian Kinerja PPN Pemangkat	20
3.4. Uraian Capaian Kinerja PPN Pemangkat	22
IK. 1. Penerimaan PNBP di PPN Pemangkat	22
IK. 2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat	24
IK. 3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis	26
IK. 4. Tingkat Kinerja PPN Pemangkat	28
IK. 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	30
IK. 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	31
IK. 7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	33
IK. 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	34
IK. 9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	36
IK. 10. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat	37
IK. 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	39
IK. 12. Nilai PM SAKIP PPN Pemangkat	40
IK. 13. Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat	42
IK. 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan	43
IK. 15. Persentase Pengelolaan BMN PPN Pemangkat	45
IK. 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	46
IK. 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Pemangkat	48
IK. 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat	49
3.5. Akuntabilitas Keuangan	51
BAB IV PENUTUP	54

4.1. Kesimpulan	54
4.2. Tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya	54
4.3. Rekomendasi tindak lanjut	55
DAFTAR LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perencanaan Kinerja 2026	14
Tabel 2. Rincian Capaian Kinerja Triwulan I 2026	21
Tabel 3. Capaian IK Penerimaan PNPB di PPN Pemangkat	22
Tabel 4. Capaian IK Volume Produksi Perikanan Tangkap 2026	25
Tabel 5 Capaian IK Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis	27
Tabel 6 Capaian IK Tingkat Kinerja PPN Pemangkat	29
Tabel 7 Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	30
Tabel 8 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	32
Tabel 9 Capaian IK Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	33
Tabel 10 Capaian IK Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	35
Tabel 11 Capaian IK Nilai Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal	36
Tabel 12 Capaian IK Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat	38
Tabel 13 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	39
Tabel 14 Capaian IK Nilai PM SAKIP PPN Pemangkat	41
Tabel 15 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat	42
Tabel 16 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	44
Tabel 17 Capaian IK Pengelolaan BMN	45
Tabel 18 Capaian IK Nilai IKPA	47
Tabel 19 Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran	48
Tabel 20 Capaian IK Nilai SKM	49
Tabel 21 Efisiensi Penggunaan Anggaran	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Triwulan I	2
Gambar 2. Perjanjian Kinerja 2026	17
Gambar 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2026	19
Gambar 4. Capaian Kinerja 2026 pada Kinerjaku	20
Gambar 5. Perbandingan PNBP Triwulan I 2025 s.d. 2026	23
Gambar 6. Infografis PNBP Non SDA PPN Pemangkat	23
Gambar 7. Perbandingan Capaian PNBP dengan PPN Sungailiat	23
Gambar 8 Perbandingan Capaian Volume Produksi Triwulan I 2025-2026	25
Gambar 9. Perbandingan Capaian Volume Produksi dengan PPN Sungailiat	25
Gambar 10 Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja Triwulan I 2025-2026	29
Gambar 11 Perbandingan Capaian Tingkat Kinerja dengan PPN Sungailiat	29
Gambar 12 Perbandingan Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I 2025-2026	35
Gambar 13 Perbandingan Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dengan PPN Sungailiat	35
Gambar 14 Perbandingan Capaian Nilai SKM dengan PPN Sungailiat	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Secara Geopolitis lokasi PPN Pemangkat memiliki nilai strategis, berada di garda depan Laut Natuna Utara, dan berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Konsekuensinya memberikan implikasi positif dan negatif. Implikasi positif memiliki akses pasar luar negeri yang menjanjikan dan implikasi negatif rawan terhadap pelanggaran dan pencurian ikan oleh kapal ikan asing.

Sebagai pelabuhan perikanan yang berada di lingkaran luar, perannya harus dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas fasilitas pelabuhan agar dapat memfasilitasi perkembangan usaha penangkapan ikan yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan, pusat pengumpulan data dan penyuluhan, serta pusat pelayanan informasi. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan kegiatan pengembangan prasarana perikanan tangkap di lingkaran luar wilayah Indonesia (*outer ring fishing port*) dalam rangka memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur manajemen operasional (*good operation and management practice*) dan dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat perikanan (*one-stop shopping fishing port*).

Secara krusial dari beberapa pemanfaatan sumberdaya ikan sudah berada dalam kondisi *overexploited*, seperti udang penaeid, lobster dan cumi-cumi. Kendatipun demikian, sumberdaya ikan demersal, pelagis kecil, pelagis besar dan ikan karang konsumsi masih terbuka peluang untuk dimanfaatkan secara optimal.

Memperhatikan potensi sumberdaya ikan dan lingkungannya, sumber daya manusia serta permintaan pasar dalam dan luar negeri yang dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menggembirakan untuk produk-produk perikanan seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai sumber protein yang menyehatkan dan bebas kolesterol, maka sangat memungkinkan untuk membangun industri perikanan yang kokoh, mandiri dan berkelanjutan serta memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan konsumsi ikan dalam negeri serta

meningkatkan penerimaan devisa Negara yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu perumusan kebijakan pembangunan perikanan tangkap nasional yang tepat, terarah, terpadu dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan sasaran pembangunan perikanan tangkap sebagaimana dijelaskan pada alinea di atas, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah membangun berbagai prasarana perikanan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupa pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan tangkap.

Perkembangan armada kapal perikanan yang berada di PPN Pemangkat dan sekitarnya selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat dengan ukuran kapal yang semakin besar. Kecenderungan peningkatan ini diprediksi akan terus berlangsung pada masa yang akan datang. Terutama sebagai akibat kenaikan bahan bakar yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasional penangkapan ikan, khususnya bagi kapal ukuran diatas 30 GT yang beroperasi di WPP NRI 711 (Zona I) akan melakukan relokasi pelabuhan pangkalan dari pulau Jawa (Jakarta, Pekalongan dan Pati) ke wilayah yang berdekatan dengan *fishing ground*, diantaranya ke PPN Pemangkat.

Tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan tangkap di PPN Pemangkat harus didukung oleh kegiatan usaha penunjang berupa industri pendukung dalam kawasan pelabuhan. Antara lain industri galangan kapal, industri perakitan alat tangkap, industri perbankan, industri pengolahan hasil perikanan, suplai perbekalan (air, es dan BBM), sektor pariwisata dan perdagangan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- a. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; dan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 41 A, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Maka fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;

- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau pengendalian lingkungan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas “Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan”. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan

- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Selaku Unit Pelaksana Teknis Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengarah pada tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pusat Industri Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat agar Tercapai Pelabuhan Perikanan yang Maju, Berkelanjutan menuju Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera”.

Berdasarkan visi tersebut dapat diartikan bahwa kawasan PPN Pemangkat merupakan titik sentral bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan industri perikanan mulai dari sub sistem penyediaan sarana produksi dan pengolahan hasil perikanan serta sub sistem pemasaran produk. Di sisi lain dalam operasionalnya juga senantiasa mengutamakan pelayanan publik guna mendukung peningkatan produktivitas nelayan dan pengusaha perikanan serta menjaga keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tingkat kelestariannya.

Misi

Untuk dapat mencapai visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tingkat operasional pelabuhan yang secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi perikanan, maka PPN Pemangkat mengemban misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan zona integritas sesuai standar ISO 9001:2015;
2. Peningkatan kompetensi nelayan di pelabuhan perikanan;
3. Peningkatan kontribusi ekonomi melalui investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan;
4. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap melalui penyiapan data dan informasi di pelabuhan perikanan yang akurat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan SDM dan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.

Tujuan

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zona integritas (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan penerapan ISO 9001:2015 dengan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagai alat ukur peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Peningkatan Kompetensi nelayan di PPN Pemangkat dengan melaksanakan bimbingan teknis baik penangkapan ikan, keselamatan pelayaran dan mutu hasil perikanan yang difasilitasi program internal maupun program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Peningkatan investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan dengan melakukan sosialisasi, promosi dan peningkatan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan peluang usaha di PPN Pemangkat;
4. Menyiapkan data dan informasi pelabuhan perikanan yang akurat dengan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh PPN Pemangkat sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap. Adapun perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perencanaan Kinerja 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	1.010,14
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	10.453,98
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	41
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	517
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,28

5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	77
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	82
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,8

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu. Perjanjian kinerja PPN Pemangkat pada tahun 2026 dilaksanakan antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala PPN Pemangkat.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja 2026

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782 LAMAR www.kkp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Anam Tofani Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama : Lotharia Latif Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 14 Januari 2026	
PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  Lotharia Latif	PIHAK PERTAMA Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat  Anam Tofani

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Sasaran Strategis Perikanan Tangkap

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun Sasaran Program dan Indikator Kinerja Level I DJPT 2025 yaitu :

1. Kesejahteraan Nelayan Meningkat
 - a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
 - a. Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap
 - a. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

3.2. Sasaran Strategis PPN Pemangkat

Sasaran kinerja yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan upaya mendukung ketercapaian sasaran strategis level I DJPT, maka sasaran strategis dan indikator kinerja PPN Pemangkat disusun berdasarkan indikator kinerja level I DJPT menjadi program-program yang dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Adapun matriks cascading dapat dilihat pada lampiran 2. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja PPN Pemangkat yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebagaimana tersaji berikut:

Gambar 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2026

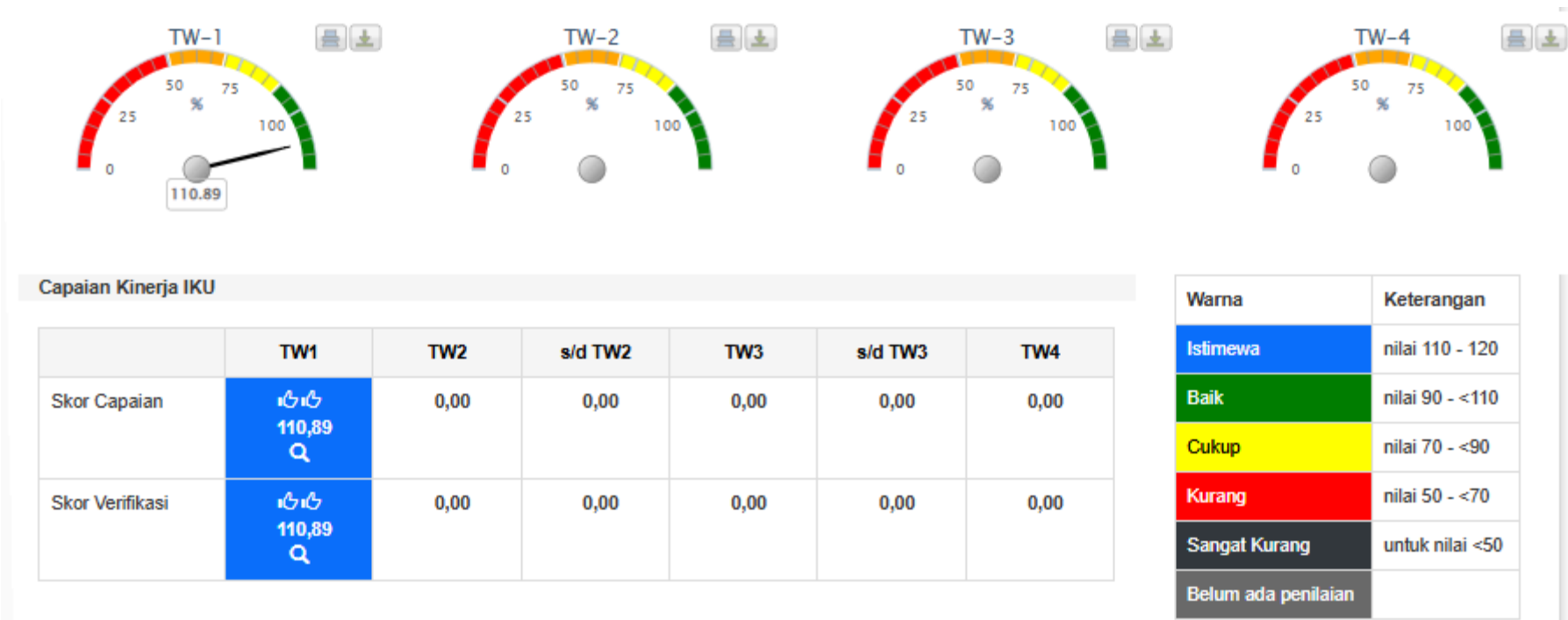
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	1.010,14
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	10.453,98
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	100
		6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	41
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	33
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	517
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,28
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	75,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	86
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88,2
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	84,5
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	77
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	82
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	92,1
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	71,75
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,8

3.3. Capaian Kinerja PPN Pemangkat

Capaian kinerja PPN Pemangkat secara periodik dinilai melalui website resmi kinerja lingkup KKP (kinerjaku.go.kkp.id). Capaian nilai triwulan I tergambar sebagai gambar 4 berikut. Pada triwulan I skor capaian kinerja organisasi PPN Pemangkat adalah 110,89 dengan predikat **Istimewa**

Gambar 4. Capaian Kinerja 2026 pada Kinerjaku



Capaian kinerja merupakan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam sasaran kinerja PPN Pemangkat. Adapun rincian capaian kinerja PPN Pemangkat triwulan I Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rincian Capaian Kinerja Triwulan I 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026	Target Triwulan I 2026	Capaian	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	1.005.519,75	150,00	169,4	112
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat (Ton)	10.453,98	1.154,48	1.878,4	162
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang optimal dan bertanggung jawab	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	88	88	90,75	103
		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	33	33	95,69	289
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	497	514	518	100,7
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	86	86	100	116
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	77	77	100	120
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	88,8	88,8	95,33	107,35

3.4. Uraian Capaian Kinerja PPN Pemangkat

Dalam bab ini dijelaskan capaian setiap indikator kinerja terhadap

1. Target pada triwulan I yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kinerja dan rincian target IKU;
2. Perbandingan capaian kinerja pada IKU yang sama pada triwulan I tahun 2021 s.d. 2025;
3. Perbandingan capaian kerja dengan standar nasional; dalam hal ini dibandingkan dengan PPN Sungailiat dengan rasionalisasi masih dalam satu WPP yang sama yakni WPP 711 (Zona I).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dan kegiatan penunjang yang telah dilakukan; dan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan manusia.

SS.1 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di PPN Pemangkat

Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 1 yaitu Penerimaan PNBP di PPN Pemangkat

IK. 1. Penerimaan PNBP di PPN Pemangkat

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, baik penerimaan fungsional maupun penerimaan umum. Perhitungan indikator ini yaitu nilai akumulasi Penerimaan atas jasa-jasa bulan berjalan. Berikut Capaian Indikator Kinerja Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat triwulan I Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Capaian IK Penerimaan PNBP 2026 di PPN Pemangkat

SS-1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat						
IKU-1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)						
Realisasi Triwulan 1	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
195,48	1.006	150,00	169,40	17	113	-	-

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026 dari target triwulanan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 150 juta, berhasil dicapai dengan realisasi sebesar Rp.169.399.980,00 dengan persentase sebesar 113%. Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka persentasenya baru mencapai 17%. Berhubung belum terbitnya Renstra DJPT (masih menggunakan draft Renstra 2025-2029) sehingga persentase capaian terhadap target pada Renstra belum dapat disajikan.

Indikator kinerja PNBPN ini dilaksanakan oleh semua UPT lingkup DJPT. Capaian indikator kinerja PNBPN PPN Pemangkat jika dibandingkan dengan capaian pada indikator yang sama pada PPN Sungailiat sedikit lebih rendah yaitu 7 poin di bawah PPN Sungailiat sebagaimana gambar disamping. Capaian ini dikarenakan peran serta seluruh komponen mulai dari petugas pelayanan dan pengguna jasa yang berada di lingkungan PPN Pemangkat. Selain itu, untuk PNBPN Non SDA terdapat perbaikan data dan sistem dalam pendataan sehingga data yang dicapai menjadi akuntabel.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini disebabkan oleh kinerja ASN (PNS dan PPPK) yang membaik sehingga pelayanan yang dulu belum ditangani secara optimal, saat ini dengan sistem yang baru berdampak pada peningkatan pelayanan menjadi lebih baik. Dari sisi anggaran, guna mendukung IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp.7.644.000,00 untuk kegiatan Sosialisasi SOP jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Perikanan. Sampai akhir triwulan 1 masih belum dilaksanakan sehingga belum ada penyerapan anggaran.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan tercapainya peningkatan IKU ini diantaranya adalah :

1. Penggunaan aplikasi JALA PUKAT untuk pemungutan jasa kepelabuhanan (Pengadaan Air Bersih, Sewa Alat Berat, Listrik, Pas Masuk), dengan aplikasi tersebut data jasa kepelabuhanan dapat berekonsiliasi dengan baik;
2. Penggunaan aplikasi SIJAKA untuk penarikan jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penertiban Pas Masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

Dalam hal penertiban pas masuk terdapat permasalahan yang dihadapi yakni kurang efektif dan efisiennya sistem, karena masih menggunakan sistem manual. Rekomendasinya adalah kedepan supaya ada peningkatan sistem pas masuk menggunakan portal semi otomatis.

SS.2 Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pemangkat meningkat

Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 2 yaitu Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat (Ton)

IK. 2. Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pemangkat

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah volume produksi ikan yang didaratkan kapal penangkapan ikan dengan pengukuran jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan oleh kapal penangkapan ikan. Berikut capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap periode triwulan I tahun 2026 sebagaimana tabel 4 di bawah ini.

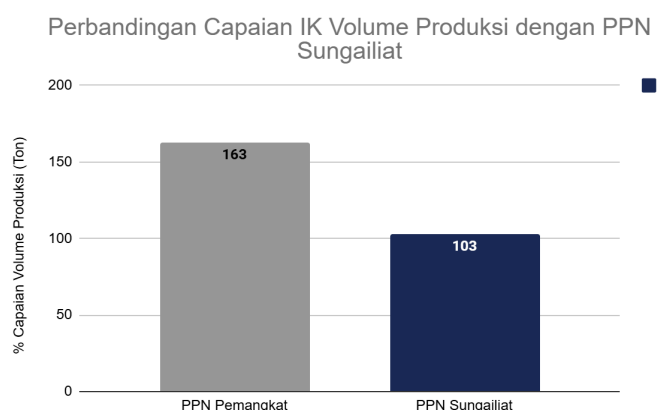
Tabel 4. Capaian IK Volume Produksi Perikanan Tangkap 2026

SS-2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Meningkat						
IKU-2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)						
Realisasi Triwulan 1	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
2.124,7	10.454	1.154	1.878,4	18	163	6	2,9

Capaian pada IK Volume Produksi Perikanan Tangkap ini sampai dengan akhir Maret 2026 sebesar 1.878,4 ton. Target untuk triwulan I sebesar 1.154,48 ton, sehingga persentase capaiannya adalah 163%. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 10.453,98 ton, maka persentase capaiannya adalah 18%.

Jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat yaitu 103% maka capaian Volume Produksi PPN Pemangkat masih lebih besar 60% sebagaimana gambar di bawah.

Penyebab keberhasilan peningkatan kinerja pada IKU ini adalah pencatatan data produksi dengan baik melalui system *online* (Aplikasi PEDATI) setiap



kapal yang melakukan pembongkaran di dermaga maupun kapal angkut ikan yang masuk dari pelabuhan lain (*port to port*) tercatat dengan baik serta ikan yang masuk melalui pengangkutan dari darat.

Dalam mendukung pencapaian target volume produksi, didukung dengan anggaran dan sumber daya manusia. Peningkatan kinerja petugas data dan keaktifan penginputan pada aplikasi PIPP yang mengakibatkan pendataan produksi membaik. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 46.532.000,00, untuk kegiatan pendukung Evaluasi Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi dan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan Perikanan. Sampai dengan akhir triwulan 1 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.802.915,00 atau baru sebesar 18,92%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah adanya

1. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan; dan
3. Penggunaan aplikasi PIPP.

SS.3 Pengelolaan PPN Pemangkat yang Optimal dan Bertanggung jawab

Terdapat 3 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 3 yaitu Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi, Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai) dan Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

IK. 3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan. Penanggung jawab indikator kinerja ini adalah Tim Kerja TKPU, adapun

pelaporannya bersifat tahunan, sehingga realisasi capaian belum dapat tersaji dalam laporan triwulan I.

Tabel 5 Capaian IK Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi

SS-3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab						
IKU-3	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Persen)						
Realisasi Triwulan 1	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	100	-	-	-	-		

Sesuai dengan rincian target indikator persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat pada Triwulan IV 2025, belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan I 2026, maupun dengan target tahun 2026 atau dengan capaian pada PPN Sungailiat.

Berkaca pada tingkat ketercapaian IKU ini pada tahun 2026 adalah 100% hal ini dikarenakan adanya pendelegasian yang jelas terhadap pegawai yang menangani, monitoring dari ketua tim kerjanya dan tanggung jawab serta komitmen pegawai yang bersangkutan, hal ini tercermin dalam laporan SKP.

Pelaksanaan IKU Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 81.151.000,00 untuk kegiatan Pelaksanaan Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan. Sampai akhir triwulan 1 terserap sebesar Rp. 1.735.000,00 atau sebesar 2,14%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah adanya

1. Melakukan evaluasi dan rekap data jangka waktu kontrak pengusahaan di lingkup PPN Pemangkat secara berkala oleh petugas; dan
2. Kegiatan Evaluasi Penggunaan Fasilitas dan Penggunaan Sistem Informasi Pengusahaan (SIPAUS);

IK. 4. Tingkat Kinerja PPN Pemangkat

Indikator kinerja PPN Pemangkat merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008).

Pengukuran terhadap capaian indikator Tingkat Kinerja adalah berdasarkan hasil rata-rata nilai evaluasi pada aplikasi PIPP selama triwulan I 2024 dengan kriteria sebagai berikut

- | | |
|---|--|
| 1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP) | 16. Frekuensi Kunjungan Kapal |
| 2. E-logbook | 17. STBLK |
| 3. Aplikasi SPB-online | 18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis |
| 4. SHTI | 19. Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi |
| 5. Realisasi Penyerapan Anggaran | 20. Pelaksanaan K5 |
| 6. Pendapatan Pelabuhan | 21. Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan) |
| 7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan | 22. Penyaluran Es (Kapal) |
| 8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan | 23. Penyaluran BBM (kapal) |
| 9. Panjang Dermaga | 24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP |
| 10. Kedalaman Kolam | 25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan |
| 11. Sarana Perbaikan (<i>docking</i> , bengkel) | 26. Penyerapan tenaga Kerja |
| 12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan | 27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan |
| 13. Ketersediaan Lahan Pelabuhan | |
| 14. Pelayanan Tambat Labuh | |
| 15. Produksi Perikanan | |

Capaian kinerja IK tersebut tersaji dalam tabel 7 berikut.

Tabel 6 Capaian IK Tingkat Kinerja PPN Pemangkat

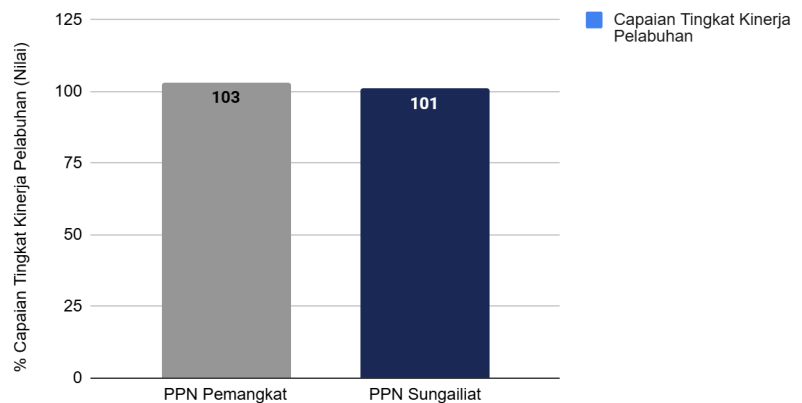
SS-3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	
IKU-4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	
Realisasi triwulan 1	2026	Renstra 2025-2029

2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
95,4	88	88	90,8	103	103		

Berdasarkan tabel di atas, didapat bahwa realisasi capaian IKU Tingkat Kinerja adalah 90,8 atau persentase capaian sebesar 103% dari target triwulan I yang telah ditentukan. Perlu disampaikan bahwa target triwulan, tahunan maupun target renstra adalah sama yakni 88. Di tahun 2026 untuk target dalam Renstra masih belum final, persentase sehingga capaiannya pun belum bisa disajikan.

Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat capaian tingkat kinerja PPN Pemangkat sedikit lebih tinggi 3%.

Perbandingan Capaian IK Tingkat Kinerja Pelabuhan dengan PPN Sungailiat



Indikator ini dapat tercapai karena adanya pendataan yang membaik dan penginputan di aplikasi PIPP yang aktif petugas. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini adalah dengan bertambahnya SDM (PPPK dan petugas data) sehingga dapat terbantu dalam hal penginputan kegiatan operasional pelabuhan pada aplikasi PIPP. Dari segi anggaran, terdapat pagu sebesar Rp. 25.968.000,00 untuk Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Pelabuhan Perikanan dan Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan. Sampai akhir triwulan 1 terealisasi sebesar Rp. 2.925.050,00 atau sebesar 11,26%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah dengan

1. peningkatan kompetensi petugas operator aplikasi PIPP melalui Bimtek;
2. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan; dan
4. Peng-entry-an data hasil produksi perikanan yang secara kontinyu pada aplikasi PIPP.

IK. 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan yang diterbitkan. Adapun pembobotannya adalah sebagai berikut

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%);
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%); dan
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%).

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru ada pada triwulan IV 2023. Sesuai dengan manual IKU, periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, untuk laporan triwulan I 2026 tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7 Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

SS-3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab						
IKU-5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat						
Realisasi Triwulan 1	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	100	0	0	0	0		

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan dilaporkan pencapaiannya pada triwulan IV 2026, sehingga capaian pada triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan tahun sebelumnya. Begitu juga halnya dengan target tahunan maupun target pada Renstra karena belum adanya Renstra yang fix dari DJPT. Pelaksanaan indikator ini secara serentak dilaksanakan secara tahunan oleh semua UPT lingkup DJPT, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian pada PPN Sungailiat.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, pagu anggaran telah disiapkan sebesar Rp.34.012.000,00 untuk kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka dalam rangka mendukung PNBK Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Sosialisasi kesyahbandaran dalam keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan Sosialisasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan Penerapan Lembar Awal di Pelabuhan Perikanan.

Sampai dengan akhir triwulan 1 anggaran terserap sebesar Rp. 1.530.000,00 atau sebesar 4,50%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian ini adalah

1. Penggunaan aplikasi Teman SPB dalam pelayanan kesyahbandaran;
2. Petugas secara rutin melakukan rekonsiliasi data SPB, STBLK dan SHTI; dan
3. Petugas melakukan pelayanan dengan baik pada pengguna jasa.

IK. 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sesuai dengan perubahan perjanjian kerja kedua. Adapun perhitungannya didasarkan pada persentase pengembangan fasilitas yang telah dilakukan dibandingkan dengan *master plan* yang dimiliki oleh PPN Pemangkat. Pengukuran indikator ini bersifat tahunan sehingga hasil pengukuran belum dapat tersaji dalam laporan triwulan I 2026.

Tabel 8 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

SS-3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab						
IKU-6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
	40	-	-	-	-		

Pada tahun 2026 PPN Pemangkat memiliki target IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan sebesar 40 persen. Sesuai dengan manula IKU periode pelaporannya secara tahunan, sehingga belum bisa diukur capaiannya baik dengan target triwulanan, target tahunan dan target pada renstra. Pelaporan IKU ini dilakukan oleh seluruh UPT lingkup DJPT secara serentak pada akhir tahun, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada PPN Sungailiat.

Bercermin pada keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas pelabuhan perikanan karena telah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pada tahun 2024 dengan baik seperti pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, pemeliharaan jalan komplek, perbaikan dan penambahan jaringan (*bandwidth*) internet, pemeliharaan dan penambahan jaringan CCTV, perbaikan *drainase*, pemeliharaan dan perbaikan jaringan air bersih, pemeliharaan dermaga dan pemeliharaan pagar keliling.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Persentase Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan bertambahnya SDM dari penambahan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat bekerja dengan baik. Selain itu adanya pembagian tugas kepada anggota Tim Kerja TKPU sebagai penanggung jawab untuk setiap item pekerjaan. Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp.520.939.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 58.651.000,00 atau dengan persentase sebesar 11,25%. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. Untuk kegiatan Pengadaan sarana perkantoran alokasi anggaran sebesar Rp.63.182.000,00 dan kegiatan Peningkatan prasarana pelabuhan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.000.000,00 sampai akhir triwulan 1 belum terealisasi.

IK. 7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formula UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menyelenggarakan kegiatan pengendalian lingkungan dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang baru ada pada perjanjian kerja kedua. Capaian indikator tersaji pada tabel 9 di bawah ini

Tabel 9 Capaian IK Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Pemangkat

SS-3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab						
IKU-7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
97,37	33,00	33,00	95,69	290	290		

Pada tahun 2026 PPN Pemangkat memiliki target IKU Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan sebesar 33. Adapun target setiap triwulan sama dengan target tahunan yakni 33. Pada triwulan I 2026 ini tercapai nilai sebesar 95,69 atau dengan persentase sebesar 290%. Persentase capaian ini lebih tinggi dari Sungailiat yaitu sebesar 14,22 poin. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I 2025, mengalami penurunan sebesar 1,68 poin. Berhubung belum adanya target pada Renstra 2025-2029, persentase capaiannya juga belum dapat disajikan.

Keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU ini karena terpenuhinya dokumen yang diperlukan dalam standar penilaian pada Aplikasi Selaraskan. Secara berkala setiap bulan dilakukan monitoring pemenuhan dokumen dengan *lead* dari Tim Kerja TKPU. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan karena keterlibatan seluruh SDM dari lintas Tim Kerja dalam pemenuhan dokumen penilaian Selaraskan.

Pada tahun 2026 IKU Nilai Pengendalian Lingkungan mendapat pagu anggaran sebesar Rp.18.025.000,00. Sampai dengan akhir triwulan I belum terealisasi untuk kegiatan Penerapan ISO 14001:2015 di Pelabuhan Perikanan dan Penguatan Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan.

SS.4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di PPN Pemangkat

Terdapat 2 Indikator Kinerja (IK) pada Sasaran Kinerja 4 yaitu Pengelolaan Awak Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di PPN Pemangkat yaitu IKU 8 dan IKU 9.

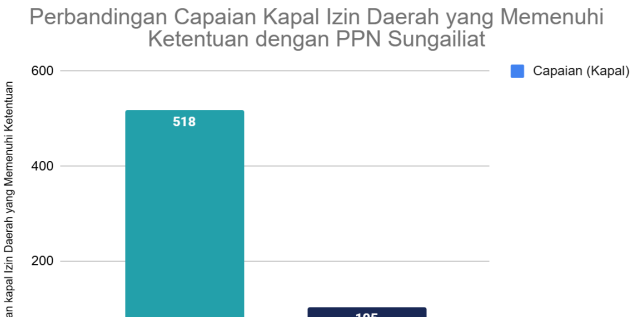
IK. 8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja ini menunjukkan Jumlah kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Sesuai dengan manual IKU-nya, perhitungannya capaian pada triwulan I merupakan penjumlahan capaian pada tahun 2023 ditambah dengan capaian pada tahun 2024 dan capaian pada triwulan I 2025. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 10 Capaian IK Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SS-4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat						
IKU-8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
507	497	514	518	104	101		

Diketahui bahwa capaian triwulan I tahun 2026 adalah 518 dari target triwulan I sebanyak sebesar 514 kapal, atau sebesar 104% dari target tahunan



yaitu sebesar 497 kapal. Jika dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 514 kapal, maka persentasenya adalah 101%. Jika dibandingkan dengan PPN Singailiat maka grafiknya sebagaimana gambar di samping.

Tingkat ketercapaian IK ini dikarenakan patuhnya kapal perikanan dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebelum masa berlakunya berakhir. Disamping itu, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023, sangat membantu pemilik kapal karena pemilik kapal dapat mengajukan pembaruan SKKP tanpa proses pemeriksaan kelaikan dan masa berlaku SKKP tersebut lebih panjang dari sebelumnya hingga sampai dengan 31 Desember 2024. Disamping itu, tingkat capaian ini dipengaruhi banyaknya pengajuan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dari kapal perikanan izin daerah yang berada di Pelabuhan Binaan seperti PP Kuala Singkawang, PPP Sungai Rengas, dan PP Sungai Kakap. SKKP merupakan salah satu dokumen persyaratan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dalam mendukung pencapaian IKU dokumen kapal perikanan yang diterbitkan didukung dengan tim SKKP yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang koordinator dan 5 orang verifikator. Kesemuanya masuk kedalam surat tugas kepala Pelabuhan Nomor B.2152/PPN.PMK/KP.440/VIII/2023.

IK. 9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang bersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Adapun formula perhitungannya adalah persentase jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL dan telah tersertifikasi dibandingkan dengan seluruh jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL. Sesuai dengan manual IKU, pelaporan IK ini bersifat tahunan, sehingga belum dapat tersaji datanya pada laporan triwulan I.

Tabel 11 Capaian IK Nilai Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

SS-4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
-------------	--

IKU-9		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)					
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Terget Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	0,26	-	-	-	-	-	-

Dikarenakan pelaporannya bersifat tahunan maka tidak dapat dibandingkan dengan target triwulan I 2025. Secara serempak IK ini dilaporkan secara tahunan oleh seluruh UPT lingkup DJPT, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada PPN Sungailiat.

Pelaksanaan Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL. Faktor yang penentu keberhasilan capaian yaitu kesadaran nelayan sebagai pelaku utama dan pemilik kapal sebagai pelaku usaha, ketersediaan petugas kesyahbandaran sebagai fasilitator Perjanjian Kerja Laut (PKL). Petugas telah melaksanakan PKL dengan beberapa nelayan yang difasilitasi oleh PPN Pemangkat. Keberhasilan Sosialisasi terkait perlindungan awak kapal perikanan oleh Tim Kerja Kesyahbandaran PPN Pemangkat dan antusiasme nelayan dan kesadaran terkait risiko kerja di kapal perikanan menyebabkan banyaknya nelayan mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Juga andil pemilik kapal mengajak diskusi seluruh ABK kapalnya agar mau menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang kemudian disahkan oleh Syahbandar di PPN Pemangkat. Sehingga persentase Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan mencapai target.

SS.5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

IK. 10. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan

publik. Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tabel 12 Capaian IK Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat

SS-5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat						
IKU-10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	75,5	-	-	-	-	81	

Sesuai dengan manual IKU Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat dilaporkan secara tahunan sehingga belum ada capaian pada triwulan I dan belum dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun-tahun sebelumnya. Target pada tahun 2026 adalah sebesar 75,5 dan pelaporan IKU ini serentak dilakukan secara tahunan oleh semua UPT lingkup DJPT, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada UPT lain.

Dalam pelaksanaan ZI WBK di PPN Pemangkat, terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU tersebut, antara lain:

1. Adanya rapat yang dilakukan secara berkala agar terkontrolnya progress pemenuhan data dukung;
2. Adanya pengerjaan dokumen data dukung yang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam LKE;
3. Terlaksananya kegiatan yang menunjang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

IK. 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pemangkat

Indikator kinerja ini merupakan hasil pengawasan Itjen kepada PPN Pemangkat berdasarkan LHP yang telah terbit pada triwulan IV 2024 yang telah ditindaklanjuti

oleh PPN Pemangkat dan menjadi objek pengawasan. Adapun capaiannya adalah sebagai berikut

Tabel 13 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk Perbaikan Kinerja

SS-5	Terwujudnya Layanana Dukungan Manajerial Yang Baik di PPN Pemangkat						
IKU-11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Persen)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
100,0	86	86	100,0	116	116	86	

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026 dari target yang telah ditetapkan sebesar 86 berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 100 dengan persentase sebesar 116%. Target tahunan maupun target triwulan memiliki besaran yang sama, sehingga persentase capaiannya sama yakni 116%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Digunakan untuk Perbaikan Kinerja didukung oleh penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Nomor tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan tentang Evaluasi Pelayanan Publik. Semua data dukung sesuai rekomendasi pada LHP Inspektorat Tersebut tersebut diatas telah disampaikan ke Inspektorat Jenderal dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Secara umum, tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan saran hasil evaluasi/pengawasan Inspektorat Jenderal serta melakukan koordinasi secara intensif kepada Inspektorat Jenderal dan DJPT.

Jika dibandingkan dengan capaian pada IKU yang sama dengan beberapa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka capaian PPN Pemangkat masih berada di atas rata-rata capaian. Dalam mendukung pencapaian IKU ini, didukung dengan sumber daya manusia dalam bentuk tim pengelolaan kinerja dan tim pelayanan publik. Kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara online dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien baik dari segi sumber

daya manusia dan waktu penyelesaiannya. Adapun dari segi anggaran kegiatan ini tidak terdapat anggaran dikarenakan sudah menggunakan Aplikasi sidak.kkp.go.id dalam pengawasan dan tindak lanjut.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program Perjalanan dalam rangka penyelesaian dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil audit lingkup DJPT.

IK. 12. Nilai PM SAKIP PPN Pemangkat

Penilaian Mandiri SAKIP merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (20%). Capaian indikator kinerja ini dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian indikator ini tersaji pada tabel 15 berikut.

Tabel 14 Capaian IK Nilai PM SAKIP PPN Pemangkat

SS-5	Terwujudnya Layanana Dukungan Manajerial Yang Baik di PPN Pemangkat						
IKU-12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	88	-	-	-		88	

Belum ada capaian IKU ini pada triwulan I, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target triwulan I 2025 dan target pada renstra. Secara serentak pelaporan IKU ini dilaksanakan pada periode tertentu, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada UPT lain lingkup DJPT pada triwulan I ini.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menggunakan Aplikasi E-sakip Reviu dalam penyampaian dokumen pemenuhan SAKIP, serta telah dilakukan reviu secara berkala terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan dokumen SAKIP ditentukan oleh kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui E-SAKIP yang terintegrasi, dan kualitas monev kinerja serta pemanfaatan hasil monev kinerja sebagai umpan balik perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja. Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah belum adanya pengumpulan data secara rutin dan tepat waktu sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Kinerja. Langkah yang akan dilakukan antara lain menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan melakukan sosialisasi dan dialog kinerja kepada seluruh pegawai. Adapun sumber daya manusia untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini ditetapkan Surat Perintah Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang terdiri dari unsur penanggung jawab masing-masing IKU.

IK. 13. Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan Indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independent. Penilaian indikator ini berdasarkan penilaian pada website ropeg .knp.go.id yang diukur menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari Riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari di bawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;

2. Kompetensi, diukur dari Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat, Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara;
3. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan Disiplin Pegawai, diukur dari Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Berikut adalah capaian indikator IP ASN PPN Pemangkat 2025

Tabel 15 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN PPN Pemangkat

SS-5	Terwujudnya Layanana Dukungan Manajerial Yang Baik di PPN Pemangkat						
IKU-13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	85	-	-	-	-	84	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan II dan IV 2026, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya, juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di Triwulan II dan triwulan IV 2026.

Tim Kerja Dukungan Manajerial telah mengakomodir peningkatan IP ASN Pegawai PPN Pemangkat melalui berbagai diklat. Komitmen keterlibatan pimpinan dalam pencapaian IP ASN diturunkan melalui memorandum Kepala Pelabuhan Nomor 40/PPN.PMK/KP.510/II/2025, tanggal 15 Februari 2025 hal Perintah Mengikuti Pengembangan Kompetensi.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini didukung oleh keaktifan dan partisipasi semua pegawai, dengan penanggung jawab IKU adalah 3 orang pengelola kepegawaian. Dari sisi anggaran, untuk mendukung IKU ini dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pengelolaan Gaji dan Tunjangan, Operasional Perkantoran dan

Alat Pengolah Data dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.666.986.000,00, telah terealisasi sebesar Rp. 2.052.672.611,00.

IK. 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Pemangkat

Indikator Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa (20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Tabel 16 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

SS-5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik di PPN Pemangkat						
IKU-14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
100	77	77	100	130	130	77	

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 hal Penyampaian hasil perhitungan capaian indikator kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP triwulan 1 tahun anggaran 2026, hasil persentase yang dicapai PPN Pemangkat adalah sebesar 130%. Jika dibandingkan dengan target pada triwulan I maupun target tahunan maka telah melebihi target. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025.

Dalam mendukung ketercapaian IKU ini, SDM yang terlibat adalah 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen. Keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat PBJ dan PPK sehingga pelaksanaan keduanya ditugaskan pada pegawai dengan jabatan fungsional P3T dan AP3T yang telah memiliki sertifikat tersebut. Dalam hal anggaran, IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp.8.160.000,00 untuk melaksanakan kegiatan Pembayaran Terkait Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Sampai dengan akhir triwulan 1 telah terealisasi sebesar Rp.1.360.000,00 atau dengan persentase serapan sebesar 16,67%.

IK. 15. Persentase Pengelolaan BMN Pelabuan Perikanan Nusantara Pemangkat

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%) ;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot 20%) ;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%); dan
5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Berikut adalah capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada PPN Pemangkat

Tabel 17 Capaian IK Pengelolaan BMN

SS-5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik di PPN Pemangkat						
IKU-15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Persen)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	82	-	-	-	-	82	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2026, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2026.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu banyak BMN yang rusak berat tetapi masih tercatat pada SIMAK BMN dan belum dilakukan penghapusan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pelelangan barang dengan kondisi rusak berat melalui KPKNL. Serta telah ditetapkan PSP terhadap bangunan dan peralatan yang diadakan tahun 2024 dan melakukan inventarisasi BMN.

Pelaksanaan IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp.4.320.000,00 , diperuntukan dalam kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN) (Honorarium pengurus/penyimpan BMN tingkat kuasa pengguna barang). Sampai dengan akhir triwulan I telah terealisasi sebesar Rp.720.000,00 , atau dengan persentase serapan sebesar 16,67%. Sumber daya manusia yang mendukung penuh IKU ini adalah 2 (dua) orang pengelola BMN dan dibantu oleh pegawai yang menangani sarana dan prasarana.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Pelaporan Keuangan dan BMN. Inventarisasi BMN serta kegiatan lain berupa pemeliharaan, peningkatan nilai dari aset yang dilakukan oleh PPN Pemangkat. Melaksanakan penghapusan BMN setelah menerima Surat persetujuan penghapusan BMN, melakukan revisi RKBMN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

IK. 16. Nilai IKPA Pelabuan Perikanan Nusantara Pemangkat

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output. Perhitungan secara sistem pada aplikasi OM-SPAN yang mengacu pada lampiran Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : ND-964/P33.2/2019, tanggal 29 Maret 2019.

Tabel 18 Capaian IK Nilai IKPA

SS-5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik di PPN Pemangkat						
IKU-16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	92	-	-	-	-	92	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2026, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2026.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IKPA yaitu melakukan revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan *revolving* UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian output dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi output sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

Guna mendukung ketercapaian IKU ini, didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang telah disediakan adalah sebesar Rp.315.045.000,00, diperuntukan untuk Honorarium Pengelola Anggaran Kegiatan sebesar Rp.94.920.000 dan efisiensi sebesar Rp.220.125.000,00. Sampai dengan akhir triwulan I 2026, telah terserap sebesar Rp.15.820.000,00 . Sumber Pencapaian IK ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN dan 1 (satu) orang Analis Keuangan.

Kegiatan yang menunjang kinerja ini adalah kegiatan yang diperoleh dengan indikator revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output, Retur SP2D, Renkas, dan Kesalahan SPM. Dilakukan penyesuaian halaman tiga DIPA setiap awal triwulan, melakukan monitoring terhadap penyampaian SPM dan data kontrak, serta penyampaian capaian output setiap tanggal 10 pada bulan berjalan.

IK. 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Kinerja perencanaan anggaran merupakan proses perencanaan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dengan bobot penilaian capaian output 43,5%, efisiensi 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 18,2%, dan penyerapan anggaran 9,7%.

Tabel 19 Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran

SS-5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik di PPN Pemangkat						
IKU-17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
-	71,8	-	-	-	-	82	

Capaian IKU ini dilaporkan pada triwulan IV 2026, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, target triwulan I dengan capaian triwulan I tahun-tahun sebelumnya. Juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada satker lain dikarenakan periode pelaporannya serentak di triwulan IV 2026.

Faktor pendukung tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu adanya peningkatan nilai penyerapan anggaran, konsistensi, capaian realisasi output, efisiensi dan nilai efisiensi. Faktor penghambat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yaitu efisiensi dan nilai efisiensi dengan perbandingan capaian output dengan penyerapan anggaran. Rencana tindak lanjut dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan cara meningkatkan nilai capaian output setiap komponen realisasi output.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber Pencapaian IK ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN dan 1 (satu) orang Analis Keuangan dan 2 (dua) orang staf.

IK. 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu

Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP. Adapun sampai dengan akhir triwulan I 2026, capaiannya IKU sebagaimana tabel berikut.

Tabel 20 Capaian IK Nilai SKM

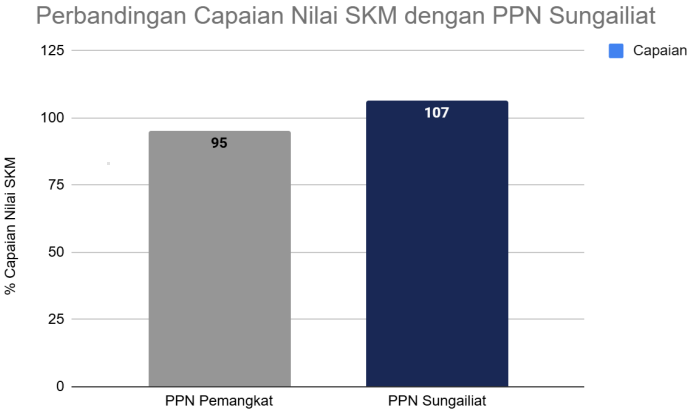
SS-5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik di PPN Pemangkat						
IKU-18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)						
Realisasi Triwulan I	2026					Renstra 2025-2029	
2025	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian thd Target Tahunan	% Capaian thd Target Triwulan I	Target 2026	%Capaian thd Target 2026
97,87	88,8	88,8	95,33	107	107	88,8	

Capaian SKM pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 95,33. Target yang telah ditentukan sebesar 88,8. Sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 107%. Target triwulan maupun target tahunan sama, sehingga persentase capaiannya sama sebesar 107%.

Berdasarkan pencapaian realisasi, jika dibandingkan dengan PPN Sungailiat, maka gambarannya seperti gambar disamping

Nilai ini diperoleh atas upaya PPN Pemangkat dengan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas, kompetensi SDM serta

mendorong kepada setiap petugas layanan untuk selalu melakukan pengisian SKM pada setiap selesai melakukan pelayanan. Selain itu, petugas pelayanan juga wajib memberikan pendampingan kepada pengguna jasa pada saat melakukan pengisian SKM sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menjawab pertanyaan pada *form* SKM.



Guna mendukung kegiatan didukung oleh 17 petugas pelayanan dan dibentuk SK Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SKM 2025. Disamping itu juga adanya penambahan SDM (PNS dan PPPK) sehingga beberapa pelayanan yang dahulu hanya ditangani 1 orang, saat ini dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan berakibat pada peningkatan pelayanan yang menjadi lebih baik

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini antara lain; (1) Melakukan peningkatan fasilitas, (2) Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SKM dan (3) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SKM kepada petugas dan pengguna jasa.

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan sumber daya telah diupayakan dan dilaksanakannya pembagian tugas pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam menunjang setiap indikator kinerja. Berikut adalah efisiensi penggunaan anggaran per indikator kinerja. Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan anggaran di bawah ini dapat dijelaskan bahwa total realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp.2.144.216.576 atau 21,46% dari total pagu sebesar Rp.9.992.277.000,00.

Tabel 21 Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Rp juta)	7.644.000,00	0,00	0,00
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meningkat	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Ton)	46.532.000,00	8.802.915,00	18,92
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang Optimal dan bertanggung jawab	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	81.151.000,00	1.735.000,00	2,13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	25.968.000,00	2.925.050,00	11,26
		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	34.012.000 ,00	1.530.000,00	4,50
		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	749.121.000,00	58.651.000,00	7,83
		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	18.025.000,00	0,00	0,00
4	Pengelolaan awak kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	0,00	0,00	0,00
		Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,00	0,00	0,00
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	0,00	0,00	0,00
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja	0,00	0,00	0,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)			
		Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	0,00	0,00	0,00
		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (indeks)	8.666.986.000,00	4.105.345.222,00	47,37
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	8.160.000,00	1.360.000,00	16,67
		Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (persen)	4.320.000,00	720.000,00	16,67
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	315.045.000,00	15.820.000,00	5,02
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (nilai)	0,00	0,00	0,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	11.320.000,00	0,00	0,00

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2026, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur. Laporan Kinerja Triwulan I ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap target tahunan dan capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, target akhir Renstra, dan capaian satker lain sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat triwulan I tahun 2026 secara keseluruhan dinyatakan tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan capaian kinerja triwulan I ini ada beberapa permasalahan, yakni :

- Sosialisasi SOP jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Kegiatan semula akan dilaksanakan pada akhir April 2026 akan tetapi dikarenakan ada kegiatan audit oleh inspektorat, maka pelaksanaannya diundur pada awal Mei 2026.
- Berkurangnya enumerator KP karena dipindahkan ke Pelabuhan Bitung sehingga ketika banyak kapal terjadi antrian bongkar.
- Peningkatan prasarana pelabuhan pelaksanaannya masih menunggu capaian PNPB karena kegiatan ini menggunakan anggaran PNPB.
- Berdasarkan hasil penilaian IKPA pada tahun berjalan terdapat ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran.

4.2. Tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan IV 2025) telah ditindaklanjuti pada periode ini dengan

- Dilakukan sinergi dengan KPP Pratama Singkawang dalam rangka memperkuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara, link https://www.instagram.com/p/DUH60g3kTgl/?img_index=3&igsh=b2hsMzA3cXc1YzYw.

4.3. Rekomendasi tindak lanjut

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang terjadi selama pencapaian kinerja triwulan I 2026, beberapa rekomendasi/hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja sebagai berikut

- Sosialisasi SOP Jasa Kepelabuhanan semula dijadwalkan pada akhir April, berhubung adanya audit oleh Inspektorat kegiatannya dilaksanakan di awal Mei 2026.
- Berkurangnya tenaga enumerator karena dipindahkan ke Pelabuhan Bitung sehingga ketika banyak kapal terjadi antrian bongkar. Untuk mengantisipasi hal tersebut PPN Pemangkat melibatkan enumerator dari Tim Kerja Operasional untuk melakukan pendataan produksi kapal izin pusat.
- Peningkatan prasarana pelabuhan yang menggunakan anggaran PNBP pelaksanaannya menunggu capaian dari PNBP tersebut, apabila telah melebihi target yang ditetapkan kegiatan baru dapat dilaksanakan.
- Berdasarkan hasil penilaian IKPA PPN Pemangkat pada tahun berjalan, indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah Deviasi Halaman III DIPA, yang mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran. Sebagai langkah mitigasi atas permasalahan tersebut, perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap rencana operasional kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan, guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2026

Lampiran 2. Matriks Cascading

Lampiran 3. Rincian Target IKU

Lampiran 4. Rencana Aksi